

## **Pengaruh indeks harga konsumen, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan investasi terhadap upah minimum di Provinsi Jambi Tahun 2002-2023**

**Ester Panjaitan;Purwaka Hari Prihanto;Jaya Kusuma Edy**

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak.Ekonomi dan Bisnis Univesitas Jambi

*E-mail korespodensi: esterpanjaitan10@gmail.com.*

### **Abstract**

*The purpose of this study was to analyze the development of the Consumer Price Index, Labor Force Participation Rate, Investment and Provincial Minimum Wage and analyze the effect of the Consumer Price Index, Labor Force Participation Rate and Investment on the Jambi Provincial Minimum Wage. The analysis method used is descriptive analysis and quantitative analysis using secondary data. Based on the results of the analysis it can be concluded that during the period 2002 to 2023 the average development of the Consumer Price Index was 2.51%, the average Labor Force Participation Rate was 0.08%, the average investment development was 20.17% and the development of the Provincial Minimum Wage was 11.03%. Simultaneously the Consumer Price Index, Labor Force Participation Rate and Investment have a significant effect on the Provincial Minimum Wage. Partially, the Labor Force Participation Rate has no effect on the Provincial Minimum Wage, while the Consumer Price Index and investment have an effect on the Provincial Minimum Wage.*

---

**Keywords:** *minimum wage, consumer price index, labor force participation rate, investment.*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan Indeks Harga Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Investasi dan Upah Minimum Provinsi serta menganalisis pengaruh Indeks Harga Konsumen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa selama periode 2002 sampai 2023 rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen sebesar 2,51%, rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 0.08%, rata-rata perkembangan Investasi sebesar 20,17% dan perkembangan Upah Minimum Provinsi sebesar 11,03%. Secara simultan Indeks Harga Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi. Secara parsial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi sedangkan Indeks Harga Konsumen dan investasi berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi.

---

**Kata kunci:** upah minimum, indeks harga konsumen, tingkat partisipasi angkatan kerja, investasi.

## PENDAHULUAN

Upah juga tetap menjadi perhatian serius bagi pekerja sebagai penerima upah, pengusaha sebagai pembayar upah, dan pemerintah sebagai regulator. Begitu pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, kebijakan yang mengatur upah harus benar-benar mencerminkan kondisi upah yang adil. Bagi pekerja atau pihak yang memberikan jasanya kepada pengusaha, upah merupakan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu upah juga mempunyai arti sebagai motivasi kerja. Bekerja dengan mendapatkan upah merupakan status simbol pekerja dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat (Purba, 2020). Ketentuan kenaikan UMP tersebut tidak dilakukan sertamerta karena dalam penetapannya mempertimbangkan sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing, serta iklim investasi di daerah masing-masing (Zahari.2014). Dalam menentukan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam hal upah, pemerintah harus memperhatikan tidak hanya kebutuhan minimum seperti pangan, sandang, dan papan, namun juga kebutuhan lain seperti transportasi, rekreasi, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Setelah pemerintah mengetahui apa itu KHL, maka pemerintah menentukan tingkat indeks harga konsumen. Indeks Harga Konsumen (IHK) biasanya memberikan informasi tentang rata-rata perubahan harga untuk sekelompok barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga selama periode waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan laju kenaikan atau penurunan harga barang sehari-hari dan jasa kebutuhan rumah tangga. IHK mengukur biaya dari sekumpulan barang konsumsi dan jasa yang dipasarkan. kelompok utama dalam kumpulan ini adalah makanan, sandang, perumahan, bahan, bakar, transportasi, dan perawatan kesehatan.

Selain menggunakan indeks harga konsumen, Indonesia menggunakan tingkat partisipasi angkatan kerja untuk menentukan upah minimum negara. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga dapat digunakan untuk menentukan penawaran tenaga kerja, dan karena upah biasanya dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja, maka upah yang sesuai bagi pekerja dapat disesuaikan sesuai dengan penawaran tenaga kerja. Investasi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang PDRB melalui peningkatan produktivitas. Investasi dalam teknologi, riset dan pengembangan, infrastruktur, dan modal manusia (pendidikan dan pelatihan) dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam ekonomi. Peningkatan produktivitas melalui inovasi di atas akan meningkatkan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, dan sebagian keuntungan tersebut dapat diberikan kepada pekerja dalam bentuk kenaikan upah (Sitorus, 2020).

Kristanto (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel KHL, PDRB, dan Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMK. Namun jika secara parsial, variabel yang berpengaruh secara signifikan dan positif hanya variabel KHL dan PDRB, sedangkan variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap penetapan nilai UMK. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Nurtiyas (2016) menunjukkan bahwa TPAK dan PDRB berpengaruh negatif terhadap UMP sedangkan Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap UMP di Pulau Jawa. Secara bersama-sama IHK, TPAK, PDRB dan Pendapatan per Kapita berpengaruh terhadap UMP.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS.2022) Nasional, Upah Minimum Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi upah ini masih tergolong rendah

dibandingkan dengan provinsi disekitarnya seperti provinsi Riau pada tahun 2021 dengan Upah Minimum Rp. 2.888.563, provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 dengan Upah Minimum Rp. 3.270.093, dan provinsi Bangka Belitung pada tahun 2021 dengan Upah Minimum Provinsi Rp. 3.230.023. Upah Minimum Provinsi Jambi masih di bawah provinsi-provinsi di atas, dimana pada tahun 2021 Upah Minimum Provinsi Jambi hanya Rp. 2.630.162.

## METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Untuk menganalisis perkembangan indeks harga konsumen, tingkat partisipasi angkatan kerja dan investasi serta upah minimum provinsi dilakukan secara deskriptif. Untuk menganalisis pengaruh indeks harga konsumen, tingkat partisipasi angkatan kerja dan investasi terhadap upah minimum provinsi dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda. Berikut adalah persamaan umum model regresi linier berganda :

$$UMP = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

- UMP(Y) : Upah minimum Provinsi Jambi,
- $\beta_0$  : Konstanta,
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi,
- X 1 : Indeks harga konsumen Provinsi Jambi,
- X 2 : Tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jambi,
- X3 :Investasi
- et : Variabel pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan upah minimum Provinsi Jambi

Upah merupakan faktor penting yang harus dimiliki tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya Tingkat pengangguran dapat meningkat karena upah minimum yang tinggi, terutama ketika populasi meningkat di setiap daerah. Jika hal ini terus terjadi tanpa kestabilan pemerintah, peningkatan upah minimum akan mampu mengurangi lapangan pekerjaan yang tersedia, membuat pengusaha mengalami defisit dan permintaan tenaga kerja yang terus menurun. Salah satu penyebab meningkatnya upah minimum ini adalah fakta bahwa perusahaan cenderung lebih mempekerjakan tenaga kerja dengan gaji rendah.

Selama kurun waktu 21 tahun, perkembangan IHK Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,03%. Upah Minimum Provinsi Jambi (UMP) 2022, tumbuh 2,61% menjadi Rp 2.698.940 dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut lebih baik dibanding tahun 2021 yang tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan. Perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 20% disebabkan oleh semakin besarnya biaya hidup yang di butuhkan di Provinsi Jambi. Upah minimum Provinsi Jambi tidak mengalami peningkatan pada tahun 2021, sehingga pemerintah daerah mengalami penurunan karena wabah virus Corona-19 yang menghentikan

semua aktivitas perekonomian. Hal ini menyebabkan banyak bisnis mengalami penurunan pendapatan dan upah tenaga kerja menurun, yang menyebabkan PHK (Sitanggang,2022).

### **Perkembangan indeks harga konsumen**

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Pemerintah Provinsi Jambi selalu berusaha dapat menekan inflasi pada harga yang terjangkau untuk masyarakat.

Selama kurun waktu 21 tahun, perkembangan IHK Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Dimana rata-rata IHK Provinsi Jambi sebesar 2,51% setiap tahunnya. Pada tahun 2004 perkembangan IHK Provinsi Jambi mengalami penurunan yang ekstrim menjadi -56,62%. Fenomena ini terjadi karena mulai tahun 2004 ke atas perhitungan IHK mencakup 283-397 jenis komoditas barang dan jasa per Kabupaten/Kota, sedangkan pada tahun 2003 ke bawah perhitungan IHK mencakup lebih sedikit komoditas barang dan jasa yaitu sebanyak 249-353 komoditas per Kabupaten/Kota. Pada tahun 2014 IHK kembali mengalami penurunan karena adanya upaya reformasi subsidi energi yang mencakup Liquefied Petroleum Gas (LPG), Tarif Tenaga Listrik (TTL), dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan salah satunya adalah terjadi perubahan harga BBM, seperti Premium dan Solar (Ginting,2017). Akan tetapi pada tahun 2005-2022 IHK Provinsi Jambi mengalami fluktuasi tetapi masih berada pada level rata-rata Indeks Harga Konsumen Nasional (Armidi,2018).

### **Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja**

TPAK digunakan untuk melihat tingginya penduduk usia kerja yang secara aktif dalam perekonomian di suatu wilayah. TPAK diukur melalui persentase dari jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini mampu menunjukkan relatif peningkatan melalui pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk melakukan kegiatan memproduksi barang ataupun jasa di perekonomian

Selama kurun waktu 21 tahun perkembangan TPAK Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Dimana rata-rata TPAK Provinsi Jambi sebesar 0,08% setiap tahunnya. Adapun jumlah angka TPAK tertinggi tercatat pada tahun 2005 yaitu mencapai 68,69% atau berkembang sebesar 2,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 67,25%. Selanjutnya pada tahun 2006 TPAK mengalami penurunan terbesar selama 21 tahun terakhir yaitu mencapai -6,45 persen. sedangkan angka TPAK terkecil tercatat pada tahun 2013 yaitu sebesar 62,65 persen, mengalami peningkatan menjadi 67,79% pada tahun 2020, menjadi 67,17% pada tahun 2021 dan menjadi 68,86% pada tahun 2022. Namun, meski Provinsi Jambi menghadapi pandemi COVID-19, hal tersebut tidak mempengaruhi partisipasi angkatan kerja untuk ambil bagian dalam pasar tenaga kerja yang ada.

### **Perkembangan investasi di Provinsi jambi**

Investasi merupakan bagian penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan suatu wilayah. Besar kecilnya investasi akan berpengaruh padaperekonomian wilayah tersebut. Sehingga ketersediaan data investasi dan analisis yang terkait dengan investasi sangat diperlukan pemerintah daerah guna mengetahui efisiensi dari investasi yang telah dilakukan (baik oleh pemerintah maupun swasta)serta dalam rangka

menentukan kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selama kurun waktu 21 tahun perkembangan investasi Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Dimana rata-rata investasi Provinsi Jambi sebesar 20,17% setiap tahunnya. Perkembangan investasi tertinggi Pada tahun 2017 yaitu 90,16% atau sebesar Rp. 528.688.908.000 hal ini menyebabkan pengangguran terbuka menurun, dan perkembangan investasi terendah yaitu tahun 2020 -26,64% atau sebesar Rp.925.943.200.000 yang di sebabkan oleh covid-19 dan pada tahun 2017 investasi tertinggi yaitu didukung oleh investasi penanam modal asing. Naik turunnya investasi yang dilakukan pemerintahan Provinsi Jambi disebabkan oleh kondisi perekonomian yang tidak memadai untuk melakukan investasi yang berkelanjutan. Selain itu, investasi ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan pemerintah, sehingga pertimbangan-pertimbangan ini menyebabkan penurunan investasi. Semakin sedikit investasi di Provinsi Jambi pasti akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja karena investasi adalah komponen yang sangat penting dalam menciptakan peluang kerja dan merekrut karyawan. Investasi yang dilakukan dengan baik menghasilkan peningkatan ekonomi karena investasi dalam modal dan barang selalu digunakan untuk memperbarui atau menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat (Ginting,2021).

### **Pengaruh IHK, TPAK, dan Investasi Terhadap Upah Minimum di Provinsi Jambi**

Hasil estimasi regresi untuk mengetahui besarnya koefisien regresi dari variabel TPAK dan IHK terhadap UMP di Provinsi Jambi baik secara simultan maupun secara parsial, dengan pengambilan keputusan adalah perbandingan antara probability (p- value) dan level of significant 5% (0,05). Berikut merupakan hasil estimasi dari persamaan regresi linier berganda yang dapat dilihat pada tabel berikut .

**Tabel 5.** Hasil regresi linear berganda

<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Standar Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob</b>
Konstanta	1988654.	4377692	0,454270	0,6551
IHK	-5442,780	2327,915	-2,338050	0,0311
TPAK	-3149,356	66794,56	-0,047150	0,9629
Investasi	1,200384	0,198858	0,198858	0,0000
R-Square	0,791918			
Adjusted R-square	0,757237			
Prob (F-statistic)	0,000002			

Sumber : Data diolah, 2024

### **Uji hipotesis**

Pengujian hipotesis secara serentak atau Uji-F digunakan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil regresi linier berganda pada Tabel 4. menunjukkan bahwa F-Statistik sebesar 22,83472 dengan

probabilitia sama dengan  $0,000002 < 0,05$ . Berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama IHK, TPAK dan investasi berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu UMP. Pengujian hipotesis secara parsial atau Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen (Indeks Harga Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan investasi) terhadap variabel dependen (Upah Minimum Provinsi). Koefisien regresi pada setiap variabel menunjukkan pengertian sebagai berikut. Pertama pada variabel IHK menunjukkan hasil nilai probab. t sebesar 0,0311 persen lebih kecil dari nilai t dengan signifikannya  $< 0,05$  persen. Hasil pengujian tersebut nilai koefisien variabel IHK berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran di Provinsi Jambi. Kedua pada variabel TPAK menunjukkan hasil nilai probab. t sebesar 0,9629 persen lebih besar dari nilai t yaitu  $< 0,05$  persen. Hasil pengujian yang dilakukan pada tahapan uji t menunjukkan nilai koefisien berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Upah Minimum di Provinsi Jambi. Ketiga pada variabel investasi telah menunjukkan hasil nilai probab. t sebesar 0,0000 persen yang menyimpulkan bahwa, nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan t yaitu  $< 0,05$ . Artinya, nilai koefisien berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah minimum di Provinsi Jambi.

### Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linear untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar statistik. Asumsi-asumsi ini penting untuk memastikan bahwa hasil analisis regresi valid dan dapat diandalkan.

**Tabel 2.** Hasil uji multikolinearitas

Variabel	VIF	Keputusan
IHK	1,165107	Bebas Multikolinearitas
TPAK	1,247219	Bebas Multikolinearitas
Investasi	1,392343	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 2 merupakan hasil uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Hasil uji multikorelinieritas dapat dilihat pada tabel kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk variabel IHK sebesar 1,165107, variabel TPAK sebesar 1,247219 serta variabel investasi sebesar 1,392343. Karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel bebas tersebut. Oleh karena itu variabel tersebut layak digunakan untuk menduga besar kecilnya UMP yang terjadi di Provinsi Jambi.

**Tabel 3.** Hasil uji heteroskedastisitas test: White

F-statistic	1,1606911	Prob. F (9,12)	0,2184
Obs*R-square	12,02350	Prob. Chi-Square(9)	0,2120
Scaled explained ss	4,756475	Prob. Chi-Square(9)	0,8550

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 3 merupakan hasil uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama dari masing-masing variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi ini digunakan metode uji white. Diketahui Prob.Chi-Square adalah 0,2120. Oleh karena Prob.Chi-Square  $0,3475 > (0,05)$  maka dapat dikatakan dalam model ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.** Hasil uji autokorelasi

F-Statistic	1,333102
Prob. F(2,15)	0,2932
Obs*R-squared	3,169343
Prob. Chi-Square(2)	0,2050

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 4 merupakan hasil uji Autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Breusch Godfrey. dapat dilihat bahwa Pro.Chi-Square adalah 0,2050. Oleh karena Pro.Chi- Square  $0,2050 > (0,05)$  maka dapat dikatakan bahwa dalam model empiris tidak terdapat permasalahan autokorelasi.

**Tabel 5.** Hasil uji normalitas

Jarque-Bera	Probability
0,705413	0,702783

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 5 merupakan hasil uji Normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Jarque- Berra LM. Berdasarkan tabel di atas Prob.Jarque-Berra adalah sebesar 0,702783 Oleh karena Prob.Jarque-Berra  $0,702783 > \alpha (0,05)$  maka dapat dikatakan bahwa variabel pengganggu berdistribusi normal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Selama periode 2002-2023 perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan investasi mengalami fluktuasi cenderung meningkat sedangkan Indeks Harga Konsumen mengalami fluktuasi yang cenderung menurun hal ini berbeda dengan perkembangan Upah Minimum Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Secara bersama-sama Indeks Harga Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan investasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Upah Minimum Provinsi. Secara parsial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi sedangkan Indeks Harga Konsumen dan investasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Upah Minimum Provinsi.

### Saran

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain untuk dapat melihat apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi Upah Minimum di Provinsi Jambi yang belum dilakukan dalam penelitian ini, seperti: PDRB, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan lain-lain agar penelitiannya dapat disempurnakan. Bagi Pemerintah Provinsi Jambi kedepannya

diharapkan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu keran investasi di sektor riil, sehingga peran angkatan kerja akan semakin banyak lapangan kerja dan lowongan kerja. Pemerintah harus tetap memperhatikan indeks harga konsumen dengan menjaga kestabilan produksi dan keseimbangan harga barang-barang manufaktur dalam peristiwa pasar. Pemerintah tetap berpegang pada perhitungan Upah Minimum Provinsi yang diterapkan. Agar dapat memperhitungkan harga barang dalam kebutuhan masyarakat, sehingga penentuan upah ini dapat dirasakan sesuai dengan apa yang diterima.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armidi, E., & Yulmardi. (2018). Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen terhadap upah minimum provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*, 7(2).
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Indeks harga konsumen Provinsi Jambi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Realisasi investasi Provinsi Jambi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023c). *Tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jambi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023d). *Upah minimum Provinsi Jambi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://bps.go.id>
- Bersales, L. G. S., & Lucagbo, M. D. C. (2014). Determinants of regional minimum wages in the Philippines. *The Philippine Statistician*, 63(2), 71–85.
- Bharath, S. T., Cho, D., & Hertzfel, M. G. (2021). How does declining worker power affect investment sensitivity to minimum wage? Available at SSRN 3931948. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3931948>
- Cacnio, F. C. Q. (2011). Do higher wages cause inflation? *Economic Newsletter*, Bangko Sentral ng Pilipinas, 11-01.
- Charysa, N. N. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4).
- Dama, H. Y., dkk. (2016). Pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03).
- Damara, G. R. (2020). Pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional (UMR) dalam perspektif ekonomi Islam di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018 (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Dervishi, B. (2023). The effect of minimum wage increases on inflation. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 12(3), 258–262. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3931948>
- Desmiwati. (2013). Faktor yang mempengaruhi kebijakan upah provinsi di Indonesia 2001-2008 (Master's thesis, Universitas Indonesia, Jakarta).
- Dua, P., & Garg, R. (2015). Macroeconomic determinants of foreign direct investment: Evidence from India. *The Journal of Developing Areas*, 133–155.
- Ginting, A. M. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi: Studi kasus di Indonesia periode tahun 2004-2014. *Kajian*, 21(1), 37–58.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanuraga, M. (2018). Pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi di Indonesia: Studi di enam provinsi Jawa (Master's thesis, Universitas Jember).
- Hermawan, L. E. (2019). Analisis penerapan upah pekerja dalam meningkatkan kinerja karyawan di BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung (Master's thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Huda, N. (2015). *Ekonomi pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Inspriyanti. (2016). Analisis faktor yang mempengaruhi upah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menggunakan model spatial autoregressive (SAR) tahun 2016 (Master's thesis, Universitas Gadjah Mada).
- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik deskriptif & regresi linier berganda dengan SPSS*. Universitas Semarang.
- Kartika, W. (2014). Implementasi kebijakan pengupahan buruh di Kabupaten Sidoarjo (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya).
- Ketiasih, L. (2017). Pengaruh tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional (UMR) di Provinsi Bali pada tahun 2008-2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(1), 148–157.
- Kistanto, I. (2013). Analisis penetapan upah minimum Kabupaten Jember (Undergraduate thesis, Universitas Jember).
- Iskandar Putong. (n.d.). *Pengantar ekonomi mikro dan makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kambono, H. (2020). Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 129(1), 137–145.
- Karno, K. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terdidik di Kota Pekanbaru 2005-2016 (Master's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau).
- Kuncoro, M. (2013). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi* (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kusumaningrum, R. R. (2023). Analisis pengaruh produk domestik bruto, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap upah minimum kabupaten/kota di Karesidenan Pekalongan tahun 2017-2021. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(5), 859–867.
- Mankiw, N. G., & Quah, E. (2018). *Pengantar ekonomi makro*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Milasari, A. S. (2010). Analisis dampak penerapan inflation targeting terhadap mekanisme transmisi melalui nilai tukar Indonesia (Master's thesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia).
- Nasir, A., Abdul Muhith, I. (2011). *Metodologi penelitian kesehatan*. Yogyakarta: Mulia Medika.
- Normalitasari, L. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi upah tenaga kerja industri kreatif kerajinan batik kayu di Kecamatan Krebet Bantul Provinsi DIY (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Nursakinah, E. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum di Jabodetabek tahun 2007-2016 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).
- Nurtiyas, F. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 5(2).

- Pangastuti, Y. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Economic Development Analysis Journal*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. (2021, Februari 2). Jakarta.
- Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori ekonomi*. Surabaya: Darma Ilmu Press.
- Purba, D. C. (2020). Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks harga konsumen, produk domestik regional bruto terhadap upah rata-rata Pulau Sumatera (Undergraduate thesis, Universitas Jambi).
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2010). *Teori ekonomi mikro: Suatu pengantar* (4th ed.). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2014). *Teori ekonomi makro: Suatu pengantar* (5th ed.). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wulansari, R. A., Zainuri, & Wilantari, R. N. (2015). Hubungan kausalitas upah minimum provinsi dan inflasi di Indonesia periode 1997-2014. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Rizki, P. K. (2012). Analisis kausalitas pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan pengangguran (Studi kasus kota kabupaten se-Jawa Timur tahun 2006-2010). *Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi*